

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Evaluasi PUMP-PB Pembudidaya Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*) di Desa Grenden Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Jawa Timur diantaranya dikutip dari beberapa sumber. Penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Drizal, Kusai, dan Bathara (2014) tentang “Dampak Program Bantuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.

Bertujuan untuk memberikan contoh ataupun motivasi pada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari maupun masyarakat Kelurahan lain agar masyarakat berkeinginan mengembangkan usaha dalam bidang perikanan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi lahan yang ada untuk budidaya perikanan.

Analisis data dengan menggabungkan data yang diperoleh di lapang dengan data yang diperoleh dari lembaga tertentu dan dianalisis dengan cara analisis kualitatif dan deskriptif. Dampak yang ditimbulkan dari adanya program PUMP yaitu peningkatan sebesar Rp.10.303.417,-/panen dimana sebelum mendapat bantuan PUMP memperoleh pendapatan sebesar Rp.6.003.061.-.

Penelitian yang dilakukan oleh Arrojib (2013), adalah “Analisis PUMP Terhadap Produksi Budidaya Ikan Lele (*Clarias gariepinus*) di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur”. PUMP merupakan upaya kegiatan pemberdayaan melalui fasilitas bantuan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pelaksanaan program PUMP yang dilaksanakan oleh DKP Kabupaten Tuban serta mengetahui pengaruh PUMP terhadap produksi budidaya ikan lele (*Clarias gariepinus*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode deskriptif dengan menggunakan teknis studi kasus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Dengan penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan fungsi cobb-douglas melalui uji F (*Over All Test*), R^2 (koefisien Regresi) dan uji T.

Proses PUMP-PB meliputi kegiatan perencanaan anggaran, identifikasi calon penerima BLM dan calon lokasi program PUMP, seleksi calon penerima dan calon lokasi penerima BLM PUMP, pengusulan dan penetapan POKDAKAN calon penerima BLM PUMP-PB, penyaluran BLM, pemanfaatan BLM, pendampingan program PUMP, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan.

Beberapa faktor pada aspek teknis yang berpengaruh nyata terhadap produksi budidaya ikan lele di Kabupaten Tuban adalah faktor wadah budidaya, benih, pakan, dan probiotik sedangkan pada aspek non teknis adalah faktor jumlah anggota kelompok dan faktor curahan kerja. Faktor-faktor tersebut jika ditingkatkan akan menambah hasil produksi kelompok pembudidaya ikan yang menjadi rekomendasi adalah bagi pemerintah, Kementrian Kelautan dan Perikanan serta DKP untuk meningkatkan produktivitas kelompok pembudidaya ikan maka kegiatan pendampingan terhadap penggunaan anggaran, penerapan teknologi probiotik serta peningkatan kapabilitas kelompok pembudidaya ikan sangat perlu untuk diintensifkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) tentang “Evaluasi Program Pengembangan Budidaya Perikanan Di Kota Batu” bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan, mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan budidaya perikanan, dan menganalisa penyebab pelaksanaan program yang masih mengalami kegagalan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan, dan pengembangan usaha perikanan pembenihan. Evaluasi proses pelaksanaan menunjukkan sebagian besar pelaksanaan program sudah sesuai dengan perencanaan. Evaluasi hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya membawa perubahan kepada hasil dari tujuan program, sehingga belum optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program antara lain adalah usaha budidaya ikan dianggap usaha sampingan, alokasi dana yang tidak sesuai kebutuhan, dan kesulitan pemasaran hasil budidaya.

Yusuf (2013) meneliti tentang “Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Nunukan”. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan. Fokus penelitian perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Hasil dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan pemerintah daerah, namun didalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Nunukan Selatan masih terdapat berbagai hambatan diantaranya anggaran minim dan kurangnya penyuluh Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sutrisno (2014) meneliti “Manfaat Pembangunan Jalur Lintas Selatan (Jls) Terhadap Masyarakat Pesisir Di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan – Jawa Timur”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Stratified Sampling* dan *Linier Time Function*. *Stratified* sampling digunakan untuk mengambil sampel dari populasi nelayan, pedagang, dan pembudidaya karena populasi yang ada berstrata berdasarkan mata pencaharian sedangkan *Linier Time Function* digunakan untuk mengambil sampel dari wisatawan karena jumlah populasi yang tak terhingga.

Tujuan dari penelitian ini adalah; 1). Mengetahui manfaat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan Jawa Timur terhadap masyarakat nelayan, pedagang, dan wisatawan, 2) Mengetahui usaha baru yang muncul setelah adanya Jalur Lintas Selatan, 3) Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan 4) Mengetahui respon dan harapan masyarakat dengan adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

Hasil penelitian ini adalah; 1). Terdapat dua nelayan yaitu; nelayan ikan pelagis dan nelayan udang lobster, manfaat yang didapat oleh nelayan adalah peningkatan pendapatan dan penurunan biaya transportasi. Dampak secara ekonomi adalah meningkatnya pendapatan sebesar Rp 340.000,00 untuk nelayan ikan pelagis dan Rp 250.000,00 untuk nelayan udang lobster. Dilain itu menurunkan biaya transportasi sebesar Rp 5.000,00 untuk semua nelayan, 2). Terdapat 3 kelompok pedagang di Desa Sidomulyo yaitu; pedagang ikan, pedagang kebutuhan harian, dan pedagang makanan. Manfaat dari pembangunan Jalur Lintas Selatan yaitu; peningkatan

pendapatan, meningkatnya harga ikan, dan barang dagangan. Dampak secara ekonomi dari pembangunan Jalur Lintas selatan yaitu; peningkatan pendapatan sebesar Rp 100.000,00 untuk pedagang ikan dan Rp 253.000,00 untuk pedagang makanan. Dilain itu juga berdampak pada penurunan pengeluaran dalam hal transportasi sebesar Rp 100.000,00 untuk pedagang ikan Rp 50.000,00 untuk pedagang kebutuhan sehari hari, 3). Manfaat yang diperoleh bagi pembudidaya adalah mempermudah komunikasi dan akses transportasi. Dampak dari pembangunan Jalur Lintas Selatan ialah pendapatan untuk setiap anggota kelompok sebesar Rp 16.560.977,00 dalam satu kali siklus budidaya, dan 4). Respon dari masyarakat dengan adanya Jalur Lintas Selatan adalah positif, ini ditunjukkan dengan harapan masyarakat yang sifatnya membangun diantaranya adalah pelebaran jalan menuju pelabuhan atau TPI.

2.2. Evaluasi

2.2.1 Pengertian Evaluasi

Kata “evaluasi”, dapat diartikan sebagai istilah dari “penilaian”, yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai sesuatu obyek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang diamati (Nur, 2012).

Evaluasi merupakan upaya menilai keseluruhan sejumlah hasil dari kegiatan atau program pembangunan. Menilai hasil bisa berupa kegiatan program atau proyek, baik dipertengahan maupun di akhir program. Tujuan utama melakukan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa program yang dijalankan berjalan sesuai rencana yang dibuat serta sesuai dengan tujuan akhir yang dicapai. Variabel utama yang perlu dinilai pada evaluasi mengacu kepada variabel tujuan program

atau proyek dan diukurnya seberapa jauh capaian program menurut indikator tujuan dimaksud (Prayogo, 2011).

Ada beberapa hal yang merupakan pokok-pokok pengertian tentang evaluasi, mencakup:

- 1) Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu obyek.
- 2) Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau miliki.
- 3) Melakukan penilaian, atas segala sesuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilaksanakan untuk selanjutnya dapat diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki (Nur, 2012).

2.2.2 Evaluasi Sebagai Salah Satu Tahapan Pembuatan Kebijakan

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap warga negaranya terikat dengan hukum. Sebagai implikasinya dalam kesejahteraan masyarakat, pemerintah membentuk sebuah kebijakan yang megatur supaya masyarakat lebih tertib dan teratur, salah satunya dengan kebijakan publik. Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat, supaya masyarakat selalu merasa aman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya di Indonesia. Seperti contoh, untuk keselamatan di jalan raya, pemerintah membuat kebijakan publik mengenai aturan lalu lintas.

Untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam bentuk fasilitas umum, pemerintah pun juga membuat kebijakan publik seperti pelayanan di rumah sakit, penertiban trayek angkutan umum dan sebagainya.

Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Kebijakan publik dibuat untuk mengatur ketertiban, terutama bila terjadi persoalan yang menyangkut pelayanan publik. Kebijakan publik diartikan sebagai aturan berupa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintah. Pemerintah berfungsi sebagai pembuat aturan dan kebijakan publik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Karena kebijakan publik ini merupakan sebuah aturan yang akan digunakan untuk mengatur sekaligus memberikan perlindungan (Widodo, 2008).

2.3. Kebijakan

2.3.1 Arti Kebijakan

Arti kebijakan menurut KBBI adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah kebijakan (*policy*) sering kali penggunaannya saling dikaitkan dengan istilah tujuan, program, dan undang-undang. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Berikut ini akan dikemukakan pengertian kebijakan dari beberapa ahli yaitu:

1. Menurut Lowi *dalam* Agustino (2012) Kebijakan adalah pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatif.
2. Menurut Bauer *dalam* Agustino (2012) memberikan batasan tentang kebijakan, yaitu: "Kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau diharapkan, sebagaimana berbeda dengan suatu keputusan mengenai suatu pelayanan kognitif atau evaluatif".

Menurut Agustino (2012) kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Istilah kebijakan menurut Wahap (2008) memberikan beberapa istilah sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- c) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- d) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- e) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu (Winarno, 2007).

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan/kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kebijakan

Analisis kebijakan dipahami sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan mengenai dan dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan para pengambil keputusan berupa informasi yang dapat digunakan untuk menguji pertimbangan yang mendasari setiap pemecahan masalah praktis yang dihadapi masyarakat luas.

Penggunaan istilah kebijakan masih terdapat keragaman, untuk memudahkan pemahaman dikemukakan pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

1. Kliejn: Kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran yang dijalankan langkah demi langkah.
2. Kuypers: Kebijakan sebagai suatu susunan dari tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok.
3. Friend: Kebijakan hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat dimasa yang akan datang.
4. Carl. J. frledrick: Kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
5. James: Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penekanan tentang kebijakan diantara para ahli. Sebagian dari mereka melihat kebijakan sebagai suatu perbuatan, sedangkan yang lain lebih melihat sebagai suatu sikap yang direncanakan atau bahkan suatu rencana dan juga suatu tindakan (Agustino, 2012).

Pengertian kebijakan menurut Hogwood *et al* (1985) adalah:

1. Kebijakan sebagai suatu merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*policy as a label form a field of activity*).
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*policy as an expression of general purpose or diserid state of affairs*).
3. Kebijakan sebagai suatu usulan-usulan khusus (*policy as specific proposals*).
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*policy as decision of government*).
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*policy as formal authorization*).
6. Kebijakan sebagai program (*policy as programme*).
7. Kebijakan sebagai keluaran (*policy as output*).
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*policy as outcome*).
9. Kebijakan sebagai suatu teori/model (*policy as a theory or model*).
10. Kebijakan sebagai suatu proses (*policy as a process*).

Dari bermacam pendapat tentang arti kebijakan diatas, secara garis besar terdapat dua pandangan. Pertama, yang menyamakan kebijakan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan publik.

Menurut Widodo (2008) mengartikan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan itu adalah apa yang benar dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik bersifat positif, dimana tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif senantiasa dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.

Dari berbagai pendapat dapat diambil satu kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah tindakan/keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

2.3.3 Tahapan Dalam Pembuatan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan (*policy cycle*) (Bridgman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008)). Cara yang paling sering ditempuh untuk membuat kebijakan adalah membagi proses perumusannya ke dalam beberapa langkah yang jelas dan mudah diidentifikasi. Salah satu pendapat Thomas R. Dye kebijakan publik adalah *is whatever government choose to do or not to do* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu meliputi seluruh tindakan pemerintah, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Termasuk di dalamnya sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah, karena yang tidak dilakukan oleh pemerintah mempunyai akibat yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Proses perumusan kebijakan bergerak melalui tiga tahapan yaitu, pengembangan ide, melakukan aksi, dan mengevaluasi hasil (Bridgman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008)). Walaupun proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam, namun menurut pendapat Suharto langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan, dan mengevaluasi kebijakan.

Dunn (2003), menjelaskan tahap-tahap dalam pembuatan kebijakan publik seperti berikut:

1. Penyusunan agenda

Dalam proses ini ada ruang untuk memahami apa yang disebut sebagai masalah publik. Dalam penyusunan agenda juga penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengabaikan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang masuk di dalam agenda kebijakan lalu dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternative/policy options) yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementers), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.3.4 Siklus Kebijakan

Menurut Peter Bridgman *et al* dalam Suharto (2008) , siklus kebijakan adalah identifikasi isu, analisis kebijakan, pengembangan instrumen kebijakan, konsultasi (dapat memasuki semua proses), koordinasi, pembuatan keputusan, implementasi, dan evaluasi.

Siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan serta
3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Efektifitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan (Agustino, 2012).

2.4. PUMP-PB

2.4.1 Pengertian PUMP-PB

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut PUMP-PB adalah bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) melalui bantuan pengembangan usaha dan sasaran prasarana budidaya dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan budidaya sesuai potensi Desa.

PUMP adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. PUMP ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan (minabisnis).

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No.15 Tahun 2011, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya disebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan budidaya sesuai dengan potensi Desa.

2.4.2 Tujuan PUMP-PB

Tujuan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha, produksi, perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha, dan memperkuat kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) serta meningkatkan kualitas lingkungan.

2.4.3 Sasaran PUMP-PB

Sasaran Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-PB) adalah berkembangnya POKDAKAN di kawasan budidaya untuk mendukung pencapaian target peningkatan produksi dan mendukung pengembangan perikanan budidaya.

2.4.4 PNPM Mandiri-KP

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian lain tentang PNPM Mandiri ialah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan, pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan

kemiskinan yang berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) adalah program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan produksi bidang kelautan dan perikanan. PNPM Mandiri KP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja kelompok masyarakat miskin bidang kelautan dan perikanan.

2.4.5 Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)

Menurut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah (2007), POKDAKAN adalah suatu kelompok usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di bidang perikanan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi keinginan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Tujuan dari POKDAKAN perikanan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggotanya.

Manfaat dari POKDAKAN perikanan ini, antara lain:

- a. Menumbuhkan rasa kepentingan bersama.
- b. Berusaha secara bersama.
- c. Meningkatkan keinginan untuk berkembang dan maju.
- d. Menghimpun modal bersama.
- e. Meningkatkan produksi dan produktifitas.

POKDAKAN di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang mendapatkan bantuan PUMP-PB adalah kelompok "Mina Mulya Sejati" budidaya ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus*). Bantuan

yang diberikan kepada kelompok “Mina Mulya Sejati” budidaya ikan lele dumbo bertujuan untuk membantu dan mengurangi kemiskinan masyarakat Desa Grenden melalui tambahan pendapatan.

2.5. Taksonomi dan Klasifikasi Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)

Ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus*) berasal dari benua Afrika dan pertama kali didatangkan ke Indonesia pada tahun 1984. Jenis ikan lele ini termasuk hibrida dan pertumbuhan badannya cukup spektakuler baik berat maupun panjangnya. Dibanding kerabat dekatnya ikan lele lokal (*Clarias batrachus*) lele dumbo memiliki pertumbuhan empat kali lebih cepat. Oleh karena itu, jenis ikan ini menjadi populer di masyarakat (Santoso, 1994).

Di Indonesia ada 3 (tiga) jenis ikan lele yang dikembangkan:

1. *Clarias batrachus*, dikenal sebagai ikan lele (Jawa), ikan kalang (Sumatera Barat), ikan maut (Sumatera Utara), dan ikan pintet (Kalimantan Selatan).
2. *Clarias teysmani*, dikenal sebagai lele kembang (Jawa Barat), kalang putih (Padang).
3. *Clarias gariepinus*, yang dikenal sebagai ikan lele dumbo berasal dari Afrika (Djarmika *et al*, 1986).

Kedudukan taksonomi ikan lele dumbo adalah sebagai berikut:

Kingdom : *Animalia*

Filum : Chordata

Kelas : Pisces

Ordo : Ostariophysi

Family : Claridae

Genus : *Clarias*

Spesies : *Clarias gariepinus* (Saanin, 1984).



Gambar 1. Morfologi ikan lele dumbo

Ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus*) memiliki morfologi yang sama dengan lele lokal (*Clarias batrachus*). Bentuk tubuh memanjang, agak bulat, kepala gepeng dan batok kepalanya keras, tidak bersisik dan berkulit licin, mulut besar, warna kulit badan terdapat bercak-bercak kelabu. Ikan lele dalam bahasa Inggris disebut pula *catfish*, *siluroid*, *mudfish* dan *waking catfish* (Puspowardoyo dan Djarijah, 2002).

Ciri morfologis lele dumbo lainnya adalah sungutnya berada di sekitar mulut berjumlah delapan buah atau 4 pasang terdiri dari sungut nasal dua buah, sungut mandipular luar dua buah, mandipular dalam dua buah, serta sungut maxilar dua buah. Ikan lele mengenal mangsanya dengan alat penciuman, ikan lele dumbo juga dapat mengenal dan menemukan makanan dengan cara rabaan (*tentakel*) dengan menggerakkan salah satu sungutnya terutama mandipular (Santoso, 1994).

2.5.1 Pemeliharaan Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)

Memelihara ikan lele dumbo dapat dilakukan diberbagai tempat. Ikan lele umumnya dipelihara di kolam. Ukuran kolam sebagai pedoman, setiap 1m³ air dapat menampung 30-50 ekor ikan lele berukuran sekitar 10 cm. Dinding kolam sebaiknya dibuat tegak lurus, karena lele memiliki patil yang dapat digunakan untuk merangkak dengan berpijak pada dinding yang agak miring ke arah pintu pengeluaran air, agar pengeringan kolam tidak mengalami kesulitan (Puspowardoyo dan Djarijah, 2002).

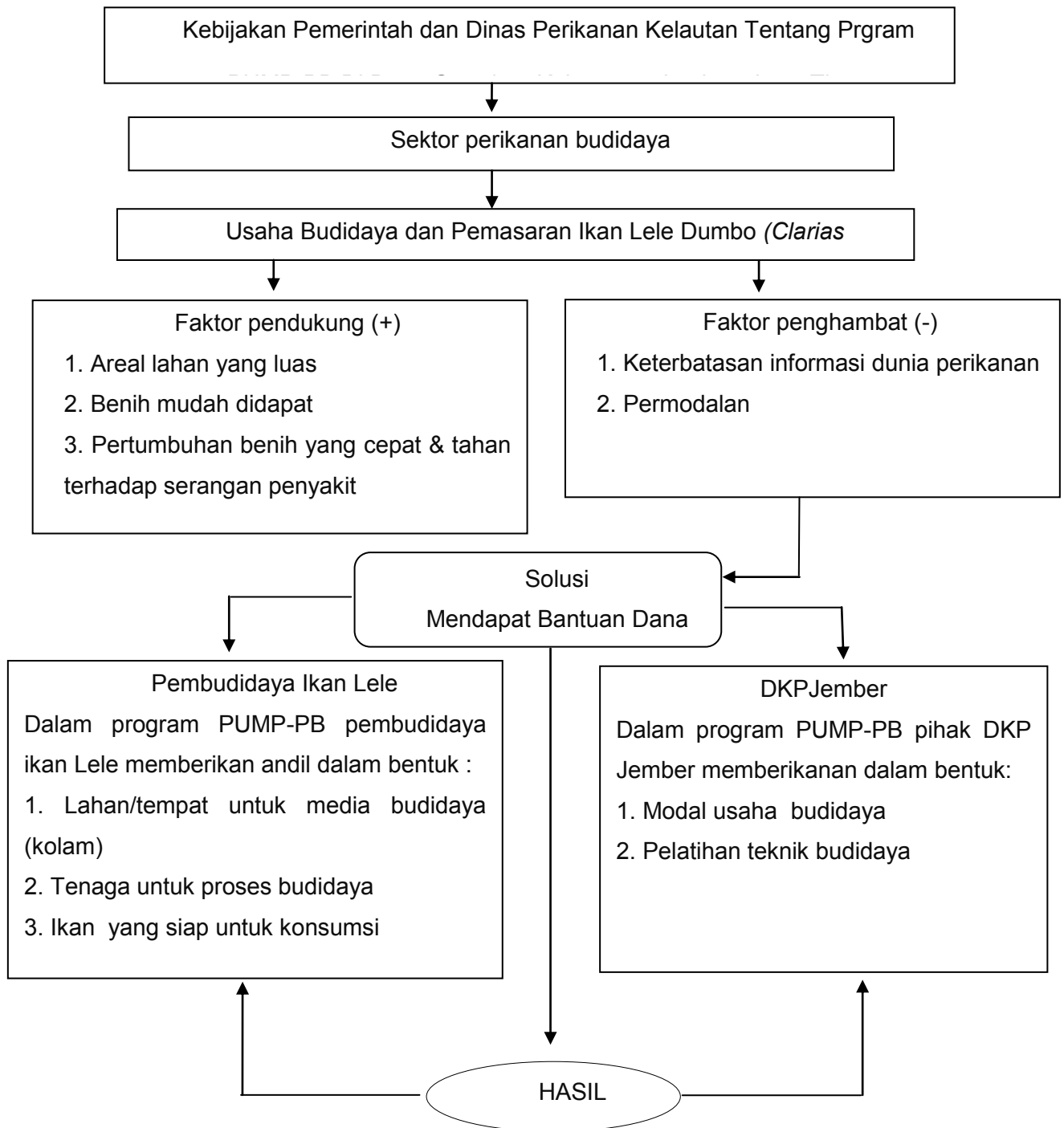
Kolam terpal adalah kolam yang dasarnya maupun sisi-sisi

dindingnya dibuat dari terpal. Kolam terpal dapat mengatasi resiko-resiko yang terjadi pada kolam gali maupun kolam semen. Pembuatan kolam terpal dapat dilakukan dipekarangan ataupun di halaman rumah.

Keuntungan lain dari kolam terpal adalah:

1. Terhindar dari pemangsaan liar.
2. Dilengkapi pengatur volume air yang bermanfaat untuk memudahkan pergantian air maupun panen.
3. Dapat dijadikan peluang usaha skala mikro dan makro.

2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka